

NAMA : MARIA ULFA RARA ARDHIKA
NPM: 2523031009

UJIAN TENGAH SEMESTER
STUDI SOSIAL EKONOMI DAN
KEWIRAUSAHAAN MAGISTER PENDIDIKAN
IPS UNIVERSITAS LAMPUNG

Dosen: Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd., dan Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., Dr. Niki Tri Sakung, M.Pd.

PETUNJUK:

UTS Dilaksanakan Secara Takehome Exam, Jawaban Diserahkan Melalui Vclass Paling Telat Tanggal 19 April 2026. Sertakan Rujukan Dalam Menjawab Soal, Hindari Copy Paste Dari Internet Atau pun Menjiplak Dari Jawaban Teman. Jika Terindikasi Plagiasi Dan Mencontek Maka Akan Diberikan Sanksi Nilai E.

Soal 1:

Sebuah daerah pesisir di Indonesia mengalami penurunan hasil tangkapan ikan selama 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh overfishing, perubahan iklim, dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Dampaknya, pendapatan nelayan menurun drastis, angka kemiskinan meningkat, dan terjadi migrasi tenaga kerja ke kota. Pemerintah daerah telah mencoba memberikan bantuan subsidi, namun belum menunjukkan hasil signifikan.

Pertanyaan

- 1. Analisislah akar permasalahan ekonomi yang terjadi dengan menggunakan pendekatan multidisipliner (ekonomi, sosial, dan lingkungan).**

Jawab :

Permasalahan penurunan hasil tangkapan ikan di daerah pesisir merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

a. Aspek Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, terjadi overfishing yang menyebabkan *depletion of fish stock* (penurunan stok ikan). Dalam teori ekonomi sumber daya, kondisi ini dikenal sebagai *tragedy of the commons*, di mana sumber daya bersama dieksploitasi secara berlebihan karena tidak adanya regulasi yang efektif (Hardin, 1968). Akibatnya:

- Produktivitas nelayan menurun
- Pendapatan rumah tangga pesisir menurun
- Ketergantungan pada bantuan pemerintah meningkat

b. Aspek Sosial

Secara sosial, penurunan pendapatan memicu:

- Kemiskinan struktural di komunitas nelayan
- Migrasi tenaga kerja ke kota (*urbanisasi ekonomi*)
- Melemahnya solidaritas sosial dan budaya maritim

Menurut Chambers (1983), kemiskinan di wilayah pesisir sering bersifat *interlocking deprivation*, yaitu saling terkait antara keterbatasan ekonomi, akses pendidikan, dan kelembagaan.

c. Aspek Lingkungan

Dari sisi lingkungan:

- Overfishing merusak keseimbangan ekosistem laut
- Penggunaan alat tangkap destruktif (misalnya bom ikan, trawl) memperparah kerusakan habitat
- Perubahan iklim (kenaikan suhu laut, perubahan arus) mengganggu pola migrasi ikan

FAO (2020) menegaskan bahwa lebih dari 34% stok ikan dunia berada pada kondisi overexploited, yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi nelayan.

2. Evaluasi kebijakan pemerintah yang telah dilakukan.

Jawab :

Kebijakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah pada dasarnya merupakan bentuk intervensi ekonomi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pendapatan nelayan dalam jangka pendek. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, kebijakan ini cenderung bersifat simptomatik (mengobati gejala), bukan solutif (menyelesaikan akar masalah).

Secara ekonomi, subsidi sering kali tidak tepat sasaran dalam konteks perikanan tangkap. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan, subsidi justru dapat memperbesar kapasitas penangkapan (misalnya melalui bantuan bahan bakar atau alat tangkap), yang pada akhirnya memperparah praktik overfishing. Dalam perspektif ekonomi sumber daya, hal ini menciptakan *negative feedback loop*, di mana peningkatan kapasitas tangkap tidak diimbangi dengan ketersediaan stok ikan, sehingga justru mempercepat

degradasi sumber daya (World Bank, 2012).

Dari sisi kelembagaan, kebijakan subsidi juga menunjukkan lemahnya pendekatan tata kelola (*governance*). Tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan bantuan menyebabkan potensi penyalahgunaan serta tidak adanya perubahan perilaku nelayan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini juga minim integrasi dengan regulasi lingkungan, seperti pembatasan alat tangkap destruktif atau pengaturan zona tangkap. Akibatnya, subsidi berjalan tanpa arah strategis yang jelas.

Secara sosial, bantuan yang bersifat langsung (cash transfer atau subsidi input) berisiko menimbulkan ketergantungan struktural pada pemerintah. Nelayan menjadi kurang terdorong untuk berinovasi atau mencari alternatif mata pencaharian. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan pandangan Chambers (1983) yang menyatakan bahwa pendekatan pembangunan yang tidak partisipatif cenderung memperkuat posisi masyarakat sebagai objek, bukan subjek pembangunan.

Selain itu, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan dinamika perubahan iklim yang turut memengaruhi distribusi dan ketersediaan ikan. Tanpa integrasi dengan kebijakan adaptasi iklim, seperti penyediaan informasi cuaca, pelatihan adaptasi, atau diversifikasi usaha, subsidi menjadi tidak relevan dengan tantangan yang dihadapi nelayan saat ini (FAO, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegagalan kebijakan subsidi bukan terletak pada niatnya, melainkan pada desain dan implementasinya yang:

- Tidak berbasis pada keberlanjutan sumber daya
- Tidak terintegrasi secara lintas sektor (ekonomi, sosial, lingkungan)
- Tidak memberdayakan masyarakat secara aktif

Kebijakan yang efektif seharusnya mengarah pada transformasi sistem ekonomi pesisir, bukan sekadar mempertahankan kondisi yang sudah tidak berkelanjutan.

3. Rancanglah solusi inovatif berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Jawab :

Solusi yang ditawarkan harus mampu menjawab akar permasalahan secara komprehensif, dengan menempatkan masyarakat nelayan sebagai aktor utama. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga menciptakan

keberlanjutan jangka panjang.

Langkah pertama yang krusial adalah penerapan pengelolaan perikanan berbasis komunitas (community-based fisheries management). Dalam pendekatan ini, nelayan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya. Mereka dilibatkan dalam penentuan zona tangkap, musim penangkapan, serta jenis alat tangkap yang diperbolehkan. Pendekatan ini terbukti efektif karena memanfaatkan pengetahuan lokal (*local ecological knowledge*) yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ostrom (1990) menegaskan bahwa pengelolaan berbasis komunitas mampu mengurangi eksploitasi berlebihan karena adanya rasa memiliki terhadap sumber daya.

Selanjutnya, diperlukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan nelayan pada perikanan tangkap. Diversifikasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan budidaya perikanan (seperti tambak ikan atau rumput laut), pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah (misalnya ikan asap, abon, atau produk olahan lainnya), serta pengembangan sektor ekowisata pesisir. Ekowisata, misalnya, tidak hanya memberikan sumber pendapatan alternatif, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan karena keindahan alam menjadi aset utama.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi nelayan menjadi sangat penting. Koperasi dapat berfungsi sebagai wadah kolektif untuk mengakses permodalan, memperkuat posisi tawar terhadap pasar, serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Dengan sistem ekonomi kolektif, distribusi keuntungan menjadi lebih adil dan stabilitas ekonomi masyarakat dapat terjaga.

Aspek teknologi juga perlu diintegrasikan melalui penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap selektif yang tidak merusak ekosistem harus didorong melalui pelatihan dan insentif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi cuaca, sistem informasi lokasi ikan, dan pemasaran digital dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing nelayan.

Tidak kalah penting adalah upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir. Program seperti penanaman mangrove, restorasi terumbu karang, dan penetapan kawasan konservasi laut harus dilakukan secara partisipatif. Ekosistem yang sehat akan meningkatkan produktivitas perikanan secara alami, sehingga menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Terakhir, semua upaya tersebut harus didukung oleh pendekatan pendidikan dan

peningkatan kapasitas masyarakat. Pelatihan keterampilan, penyuluhan lingkungan, serta pendidikan kewirausahaan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang adaptif dan inovatif. FAO (2020) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan perikanan sangat bergantung pada kapasitas manusia dan kelembagaan lokal.

Dengan demikian, solusi yang efektif bukan hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi pada transformasi sistem sosial-ekonomi pesisir secara menyeluruh. Pendekatan berbasis pemberdayaan ini akan menciptakan masyarakat nelayan yang mandiri, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

4. Jelaskan bagaimana peran pendidikan IPS dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Jawab :

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan permasalahan penurunan hasil tangkapan ikan di wilayah pesisir, karena IPS tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis, sikap, dan keterampilan sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Secara konseptual, IPS mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, geografi, sosiologi, dan lingkungan, sehingga sangat tepat digunakan untuk memahami permasalahan pesisir yang bersifat multidimensional. Dalam konteks ini, pendidikan IPS dapat membantu peserta didik memahami keterkaitan antara aktivitas ekonomi (penangkapan ikan), kondisi lingkungan (kerusakan ekosistem laut dan perubahan iklim), serta dinamika sosial (kemiskinan dan migrasi). Pemahaman yang holistik ini penting agar generasi muda tidak melihat masalah secara parsial, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung.

Lebih jauh, pendidikan IPS berperan dalam meningkatkan literasi lingkungan dan ekonomi masyarakat. Melalui pembelajaran yang kontekstual, siswa dapat memahami konsep keberlanjutan (*sustainable development*), termasuk pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan konservasi. Hal ini dapat membentuk kesadaran sejak dini bahwa praktik seperti overfishing dan penggunaan alat tangkap destruktif tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, IPS juga berfungsi dalam membentuk sikap kritis dan partisipatif. Peserta didik didorong untuk menganalisis kebijakan publik, seperti subsidi perikanan, serta mengevaluasi efektivitasnya. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi individu yang pasif, tetapi mampu berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan melahirkan warga negara yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan mampu terlibat dalam pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Pendidikan IPS juga dapat mendorong inovasi sosial berbasis lokal melalui pendekatan pembelajaran aktif seperti *project-based learning*. Misalnya, siswa dapat dilibatkan dalam proyek penelitian sederhana terkait kondisi pesisir di daerahnya, merancang solusi seperti kampanye penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, atau mengembangkan ide usaha berbasis potensi lokal (seperti pengolahan hasil laut atau ekowisata). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Di sisi lain, IPS memiliki peran penting dalam pelestarian nilai dan kearifan lokal. Banyak komunitas pesisir di Indonesia memiliki tradisi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, seperti sistem larangan menangkap ikan pada periode tertentu. Melalui pendidikan IPS, nilai-nilai ini dapat diangkat kembali dan diintegrasikan dalam pembelajaran, sehingga tidak hilang oleh arus modernisasi. Kearifan lokal ini justru dapat menjadi solusi alternatif yang relevan dan efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Terakhir, pendidikan IPS berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik akan membuka peluang bagi generasi muda pesisir untuk memiliki keterampilan yang lebih beragam, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada sektor perikanan tangkap. Dengan demikian, tekanan terhadap sumber daya laut dapat berkurang, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Menurut National Council for the Social Studies (NCSS, 2010), tujuan utama pendidikan IPS adalah membentuk warga negara yang mampu membuat keputusan rasional dan bertanggung jawab demi kepentingan publik. Dalam konteks permasalahan pesisir, hal ini berarti menciptakan generasi yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya, tetapi juga menjaga keberlanjutannya.

Kesimpulannya, pendidikan IPS merupakan instrumen kunci dalam menyelesaikan permasalahan pesisir secara jangka panjang. Melalui peningkatan literasi, pembentukan sikap kritis, penguatan nilai keberlanjutan, dan dorongan inovasi sosial, IPS mampu menciptakan masyarakat yang lebih sadar, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya laut.

Soal 2:

Dinamika ekonomi mutakhir seperti perkembangan ekonomi digital dewasa ini, sejatinya, membuka peluang peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam dunia kerja melalui wirausaha digital. Wirausaha perempuan dapat memanfaatkan transformasi digital baik sebagai kreator maupun penerima manfaat (*beneficiary*). Kewirausahaan (*entrepreneurship*) digital perempuan menawarkan fleksibilitas antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Perempuan menjadi wirausaha juga acap dinilai sebagai solusi dari diskriminasi dan ketidakpuasan kaum perempuan terhadap dunia kerja reguler (Heilman dan Chen, 2003). Selain itu, peluang laki-laki dan perempuan setara dalam digital entrepreneurship. Namun, berbagai kendala sosial, normatif, dan tingkat pendidikan ditengarai menjadi batu sandungan bagi keterlibatan lebih besar kaum perempuan dalam wirausaha digital termasuk aktivitas jual beli secara elektronik (e-commerce). Sebagai contoh, jumlah wanita tercatat lebih dari 52% dari populasi Eropa tetapi hanya 34,4% dari para wirausaha di Uni Eropa yang berjenis kelamin perempuan. Faktanya, kesenjangan ini justru meningkat dengan digitalisasi ekonomi. Menurut laporan Komisi Uni Eropa, ketimpangan meningkat terlihat dari jumlah perempuan yang kurang terwakili di semua sektor ekonomi digital. Persentase laki-laki bekerja di industri digital tiga kali lebih besar dibanding perempuan. Jumlah perempuan hanya mencapai 21,5% dari seluruh pekerja ekonomi digital pada tahun 2015. Sumber: <https://analisis.kontan.co.id/news/potensi-wirausaha-digital-perempuan>

Berdasarkan kutipan berita di atas:

1) Berikan pandangan-pandangan Anda tentang ekonomi di era digital?

Jawab :

Ekonomi di era digital merupakan transformasi sistem ekonomi yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses produksi, distribusi, dan

konsumsi. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi modern, digitalisasi menciptakan efisiensi pasar melalui penurunan biaya transaksi, akses informasi yang lebih luas, serta terbukanya pasar tanpa batas geografis. Platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan marketplace memungkinkan individu, termasuk kelompok yang sebelumnya termarginalkan, untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi secara lebih fleksibel. Hal ini sejalan dengan konsep *inclusive economy*, di mana teknologi menjadi alat untuk memperluas partisipasi ekonomi (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Namun demikian, ekonomi digital juga menghadirkan ketimpangan baru (*digital divide*). Akses terhadap teknologi, literasi digital, dan keterampilan menjadi faktor penentu utama dalam memanfaatkan peluang tersebut. Kelompok yang memiliki keterbatasan akses atau pendidikan cenderung tertinggal, sehingga kesenjangan ekonomi tidak sepenuhnya hilang, melainkan berubah bentuk. Dalam konteks ini, digitalisasi bersifat *double-edged sword*—memberikan peluang sekaligus tantangan.

Dengan demikian, ekonomi digital dapat dipandang sebagai sistem yang:

- Membuka peluang luas bagi kewirausahaan dan inovasi
- Mendorong fleksibilitas kerja
- Namun berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan inklusif

2) Bagaimana pendapat Anda tentang potensi kewirausahaan dan partisipasi wanita dalam perkembangan dunia usaha dan industry?

Jawab :

Partisipasi perempuan dalam kewirausahaan digital memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Transformasi digital memberikan ruang bagi perempuan untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang selama ini membatasi keterlibatan mereka dalam dunia kerja formal.

Salah satu keunggulan utama kewirausahaan digital bagi perempuan adalah fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Perempuan dapat menjalankan usaha dari rumah sambil tetap menjalankan peran domestik. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat yang masih memiliki pembagian peran gender tradisional. Selain itu, platform digital memungkinkan perempuan untuk membangun usaha dengan modal relatif kecil, sehingga menurunkan hambatan masuk (*barrier to entry*).

Dari sisi ekonomi, peningkatan partisipasi perempuan dalam wirausaha dapat:

- Meningkatkan pendapatan rumah tangga
- Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
- Memperluas basis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Secara sosial, kewirausahaan perempuan juga berkontribusi pada pemberdayaan (empowerment), yaitu peningkatan posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Heilman dan Chen (2003) menyatakan bahwa kewirausahaan sering menjadi alternatif bagi perempuan yang mengalami diskriminasi dalam dunia kerja formal.

Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi. Hambatan seperti norma sosial, keterbatasan pendidikan, akses teknologi, serta beban ganda (double burden) masih menjadi kendala utama. Data yang menunjukkan rendahnya persentase perempuan dalam sektor ekonomi digital mencerminkan bahwa peluang yang ada belum bersifat inklusif secara merata.

Dengan demikian, kewirausahaan digital perempuan bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga instrumen penting dalam mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan.

3) Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam mensikapi ketimpangan persentase laki-laki bekerja di industri 3x lebih besar dibandingkan dengan perempuan? Berikan analisis Anda!

Jawab :

Ketimpangan yang menunjukkan bahwa laki-laki tiga kali lebih banyak bekerja di industri digital dibandingkan perempuan mengindikasikan adanya masalah struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif. Peran pemerintah seharusnya tidak hanya bersifat fasilitatif, tetapi juga transformasional dan afirmatif. Dalam hal ini, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

1. Pemerintah perlu meningkatkan akses dan literasi digital bagi perempuan. Program pelatihan keterampilan digital (digital skills training) harus dirancang secara inklusif, bagi perempuan di daerah pedesaan atau kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perempuan akan sulit bersaing di sektor digital.
2. Diperlukan kebijakan dukungan terhadap wirausaha perempuan, seperti akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta insentif bagi startup yang dipimpin perempuan. Banyak perempuan menghadapi kendala dalam akses modal karena faktor sosial maupun institusional, sehingga intervensi pemerintah menjadi krusial.

3. Pemerintah harus mengatasi hambatan normatif dan kultural melalui kampanye kesetaraan gender dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Misalnya, mendorong perusahaan digital untuk menerapkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam rekrutmen serta promosi jabatan.
4. Penguatan ekosistem ekonomi digital yang inklusif juga penting. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur digital yang merata, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, serta regulasi yang mendukung partisipasi perempuan dalam ekonomi digital.
5. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan afirmatif (affirmative action), seperti kuota atau program khusus untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di sektor teknologi dan digital. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan yang sudah terjadi cukup lama.

Secara keseluruhan, peran pemerintah harus berorientasi pada penciptaan kesetaraan peluang (equal opportunity), bukan sekadar kesetaraan formal. Tanpa intervensi yang tepat, digitalisasi justru berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada sebelumnya.

Soal 3:

Jelaskan keterkaitan ekonomi dalam konteks pembelajaran IPS? Bagaimanakah seharusnya pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan didesain dan diterapkan di persekolahan dalam upaya mengembangkan skills dan jiwa entrepreneur, sertakan contohnya.

Jawab :

Ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek sosial, geografi, dan sejarah. IPS pada dasarnya bersifat integratif, sehingga konsep-konsep ekonomi tidak diajarkan secara terpisah, melainkan dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, ekonomi membantu peserta didik memahami bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan interaksi sosial.

Keterkaitan ekonomi dalam IPS dapat dilihat dari hubungan erat antara aktivitas ekonomi dengan kondisi geografis. Misalnya, masyarakat pesisir cenderung bekerja sebagai nelayan,

sedangkan masyarakat di daerah pertanian berfokus pada sektor agraris. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi dan sumber daya alam sangat memengaruhi jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan. Selain itu, aspek ekonomi juga berkaitan dengan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, yang menjadi bagian penting dalam kajian IPS. Dari sisi sejarah, perkembangan sistem ekonomi dari tradisional hingga modern, termasuk ekonomi digital, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa aktivitas ekonomi bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

Dengan demikian, pembelajaran ekonomi dalam IPS bertujuan untuk meningkatkan literasi ekonomi peserta didik, membentuk pola pikir rasional dalam pengambilan keputusan, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijak. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membentuk individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global.

Agar tujuan tersebut tercapai, pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan di sekolah perlu didesain secara kontekstual, aktif, dan berbasis pengalaman. Pembelajaran tidak seharusnya hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam praktik kewirausahaan. Pendekatan seperti *student-centered learning*, *project-based learning*, dan *experiential learning* menjadi sangat relevan dalam mengembangkan keterampilan dan jiwa kewirausahaan.

Salah satu bentuk implementasi yang efektif adalah melalui pembelajaran berbasis proyek. Dalam kegiatan ini, siswa dapat diberikan tugas untuk merancang dan menjalankan usaha sederhana, seperti menjual makanan ringan, minuman, atau produk kerajinan. Siswa diajak untuk merencanakan usaha mulai dari menentukan modal, menetapkan harga, hingga memasarkan produk. Dari proses tersebut, siswa belajar secara langsung tentang manajemen keuangan, pengambilan keputusan, serta pentingnya kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha.

Selain itu, pembelajaran dapat dilakukan melalui simulasi kegiatan ekonomi, seperti pasar mini di kelas. Dalam kegiatan ini, siswa berperan sebagai penjual dan pembeli sehingga dapat memahami konsep permintaan, penawaran, dan proses tawar-menawar. Metode ini tidak hanya membantu pemahaman konsep, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi dan negosiasi.

Di era digital, pembelajaran kewirausahaan juga perlu memanfaatkan teknologi. Siswa dapat dilatih untuk membuat usaha berbasis digital, seperti memasarkan produk melalui media sosial

atau membuat toko online sederhana. Contohnya, siswa dapat menjual produk buatan sendiri melalui platform digital dan belajar membuat konten promosi yang menarik. Hal ini penting agar siswa memiliki kesiapan menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

Selain aspek keterampilan, pembelajaran kewirausahaan juga harus menekankan pembentukan karakter, seperti kemandirian, tanggung jawab, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui refleksi setelah kegiatan praktik, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep ekonomi, tetapi juga memiliki sikap mental sebagai seorang wirausaha.

Sebagai contoh konkret, sekolah dapat mengadakan kegiatan “Market Day”, di mana siswa secara berkelompok membuka stand usaha dan menjual produk kepada warga sekolah. Dalam kegiatan ini, siswa belajar secara langsung bagaimana mengelola usaha, bekerja sama dalam tim, serta menghadapi tantangan dalam berbisnis. Kegiatan seperti ini terbukti efektif dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini.

Kesimpulannya, ekonomi dalam pembelajaran IPS memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga pembelajarannya harus bersifat kontekstual dan integratif. Untuk mengembangkan keterampilan dan jiwa kewirausahaan, pembelajaran ekonomi di sekolah perlu dirancang secara aktif dan berbasis pengalaman nyata. Melalui pendekatan tersebut, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki kesiapan untuk menjadi wirausaha di masa depan.

Soal 4.

Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di

seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan, juga perlu ditingkatkan. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”. Pemerintah Indonesia akan mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai badan koordinator untuk penerapan SDGs yang bersifat lintas sektor. Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>

Berdasarkan kutipan artikel tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut:

a. Berikan analisis Anda tentang keterkaitan pertumbuhan penduduk, ekonomi dan kesejahteraan!

Jawab :

Pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, pertumbuhan penduduk dapat menjadi potensi (bonus demografi) sekaligus beban ekonomi, tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan ekonomi dalam menyediakan lapangan kerja.

Jika pertumbuhan penduduk, khususnya usia produktif, tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka akan terjadi peningkatan pengangguran dan pekerja miskin (*working poor*). Hal ini terlihat dari fenomena banyaknya pekerja dengan pendapatan rendah yang tidak mampu keluar dari kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa memiliki pekerjaan saja tidak cukup, tetapi pekerjaan tersebut harus bersifat layak dan produktif.

Sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tenaga kerja yang produktif akan meningkatkan output ekonomi, memperluas konsumsi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keterkaitan ketiganya bersifat saling memengaruhi:

- Pertumbuhan penduduk → memengaruhi ketersediaan tenaga kerja

- Ekonomi → menentukan kemampuan menyerap tenaga kerja
- Kesejahteraan → ditentukan oleh kualitas pekerjaan dan pendapatan

b. Mengapa perlu keseimbangan pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan lingkungan?

Jawab :

Keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan lingkungan merupakan inti dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung dan saling memengaruhi.

Pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek manusia dan lingkungan dapat menimbulkan ketimpangan sosial serta kerusakan ekologis. Misalnya, industrialisasi yang tidak terkendali dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga menyebabkan pencemaran lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, keterampilan) sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tanpa SDM yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan. Begitu pula dengan lingkungan, yang merupakan sumber utama bagi aktivitas ekonomi. Kerusakan lingkungan akan mengancam keberlanjutan ekonomi itu sendiri.

Oleh karena itu, keseimbangan diperlukan agar:

- Pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan merata
- Kualitas hidup manusia meningkat
- Lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang

Hal ini sejalan dengan Tujuan 8 SDGs yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak.

c. Bagaimana mewujudkan SDM Unggul melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan?

Jawab :

SDM unggul merupakan kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara sektor pendidikan dan kebijakan ekonomi.

Dari sisi pendidikan, perlu dilakukan:

- Peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja
- Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan (*skills-based education*)
- Integrasi literasi digital dan kewirausahaan
- Penanaman karakter seperti disiplin, kreativitas, dan tanggung jawab

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana membentuk individu yang adaptif terhadap perubahan ekonomi, termasuk perkembangan ekonomi digital.

Dari sisi pembangunan ekonomi, pemerintah perlu:

- Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja
- Mengembangkan sektor-sektor produktif (industri, UMKM, ekonomi kreatif)
- Memberikan pelatihan kerja dan *upskilling* bagi tenaga kerja
- Menciptakan ekosistem kewirausahaan

Kombinasi antara pendidikan berkualitas dan kebijakan ekonomi yang tepat akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan mampu bersaing secara global.

d. Berikan contoh nyata keberlanjutan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah Anda!

Jawab :

Contoh nyata dapat dilihat di berbagai daerah, termasuk wilayah pesisir dan pedesaan di Indonesia.

Di daerah seperti Lampung (termasuk wilayah sekitar pengguna), terdapat pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, seperti:

- Usaha pengolahan hasil laut (ikan asin, kerupuk ikan, olahan seafood)
 - Pertanian dan agroindustri (kopi, pisang, singkong)
 - Usaha kecil berbasis digital (penjualan melalui media sosial dan marketplace)
- Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat (ekonomi), tetapi juga:
- Meningkatkan keterampilan masyarakat (pembangunan manusia)
 - Memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan

Selain itu, program pemerintah seperti pelatihan UMKM, bantuan modal usaha, dan digitalisasi

pemasaran juga menjadi contoh integrasi antara pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.

Contoh lain adalah kegiatan penanaman mangrove di wilayah pesisir, yang:

- Melindungi lingkungan dari abrasi (lingkungan)
- Mendukung sektor perikanan (ekonomi)
- Melibatkan masyarakat dalam kegiatan produktif (sosial/SDM)

Soal 5.

Di era digital dan pasca-pandemi, terjadi perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, termasuk meningkatnya ekonomi digital, e-commerce, dan tren sustainable entrepreneurship. Namun, banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala:

- literasi digital rendah
- keterbatasan akses pasar global
- kurangnya inovasi berbasis keberlanjutan

Sebagai lulusan S2 Pendidikan IPS, Anda diharapkan mampu mengintegrasikan nilai kewirausahaan dalam pembelajaran.

Pertanyaan

1. **Analisis tantangan utama UMKM Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital dan globalisasi.**

Jawab :

UMKM Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun dalam menghadapi era digital dan globalisasi, terdapat sejumlah tantangan struktural yang cukup kompleks antara lain:

1. Rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama. Banyak pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, baik dalam pemasaran digital, manajemen keuangan berbasis aplikasi, maupun penggunaan platform e-commerce. Akibatnya, mereka tertinggal dalam persaingan dengan pelaku usaha yang lebih adaptif terhadap teknologi.
2. Keterbatasan akses pasar global. Meskipun digitalisasi membuka peluang pasar tanpa batas, kenyataannya UMKM masih kesulitan menembus pasar internasional. Hambatan ini meliputi kurangnya pemahaman tentang standar ekspor, branding produk, logistik, serta keterbatasan jaringan bisnis global.
3. Rendahnya inovasi dan daya saing produk. Banyak UMKM masih berfokus pada produk konvensional tanpa diferensiasi yang kuat. Padahal, dalam ekonomi global, inovasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang.
4. Kurangnya integrasi prinsip keberlanjutan. Sebagian besar UMKM belum mengadopsi praktik ramah lingkungan atau model bisnis berkelanjutan. Hal ini menjadi tantangan karena tren global saat ini mengarah pada produk yang eco-friendly dan beretika.

5. Keterbatasan akses modal dan pendampingan. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dan pelatihan yang berkelanjutan, sehingga perkembangan usaha menjadi stagnan.

Dengan demikian, tantangan UMKM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan perubahan paradigma bisnis.

2. **Rancang model pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan (entrepreneurship education) yang mampu meningkatkan kemampuan inovasi mahasiswa/siswa.**

Jawab :

Model: Project-Based Digital Entrepreneurship Learning (PDEL)

Model ini mengintegrasikan pembelajaran IPS dengan praktik kewirausahaan berbasis proyek dan teknologi digital.

a. Karakteristik Model

- Berbasis masalah nyata (problem-based)
- Berorientasi proyek (project-based learning)
- Mengintegrasikan teknologi digital
- Menekankan kolaborasi dan kreativitas
- Mengaitkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

b. Tahapan Pembelajaran

1) Identifikasi Masalah Sosial-Ekonomi

Siswa/mahasiswa menganalisis masalah nyata, misalnya:

- UMKM lokal yang belum go digital
- Produk lokal yang kurang dikenal

2) Ideasi dan Perencanaan Usaha

Peserta didik merancang ide bisnis:

- Menentukan produk/jasa
- Menyusun *business model canvas*
- Menentukan target pasar

3) Produksi dan Inovasi Produk

- Membuat produk atau prototipe
- Mengembangkan nilai tambah (kemasan, branding)

4) Digital Marketing dan Implementasi

- Membuat akun bisnis di media sosial/marketplace
- Mendesain konten promosi
- Melakukan penjualan secara langsung

5) Evaluasi dan Refleksi

- Menghitung keuntungan/kerugian
- Menganalisis kendala
- Menyusun strategi pengembangan

c. Contoh Implementasi

Mahasiswa membuat usaha produk lokal (misalnya keripik pisang khas Lampung), kemudian:

- Mendesain kemasan ramah lingkungan
- Memasarkan melalui Instagram/TikTok
- Menjual melalui marketplace

Dari kegiatan ini, peserta didik mengembangkan:

- Keterampilan digital
- Kreativitas dan inovasi
- Kemampuan berpikir kritis dan problem solving

3. Jelaskan bagaimana konsep kewirausahaan berkelanjutan (*sustainable entrepreneurship*) dapat diintegrasikan dalam model tersebut.

Jawab :

Konsep kewirausahaan berkelanjutan (*sustainable entrepreneurship*) menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan (*triple bottom line: profit, people, planet*).

Dalam model PDEL, konsep ini dapat diintegrasikan pada setiap tahap pembelajaran.

a. Pada Tahap Ideasi

Peserta didik diarahkan untuk memilih ide usaha yang:

- Ramah lingkungan (misalnya produk daur ulang)
- Memberdayakan masyarakat lokal
- Memanfaatkan sumber daya secara efisien

b. Pada Tahap Produksi

- Menggunakan bahan yang eco-friendly
- Mengurangi limbah produksi
- Menggunakan kemasan biodegradable

c. Pada Tahap Pemasaran

- Menonjolkan nilai keberlanjutan sebagai keunggulan produk
- Edukasi konsumen tentang pentingnya produk ramah lingkungan

d. Pada Tahap Evaluasi

- Tidak hanya menilai keuntungan ekonomi
- Tetapi juga dampak sosial dan lingkungan

Contoh Nyata

Mahasiswa mengembangkan produk tas dari limbah plastik:

- Mengurangi sampah (lingkungan)
- Memberdayakan masyarakat sekitar (sosial)
- Memiliki nilai jual tinggi (ekonomi)

Referensi:

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W.W. Norton & Company.
- FAO. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Heilman, M. E., & Chen, J. J. (2003). Entrepreneurship as a solution: The allure of self-employment for women and minorities. *Human Resource Management Review*, 13(2), 347–364.
- OECD. (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. Paris: OECD Publishing.
- UNDP. (2015). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington, DC: World Bank.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). *Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Roadmap SDGs Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge: Harvard University Press.

Drucker, P. F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. New York: Harper & Row.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.

Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship*. New York: McGraw-Hill Education.